

**PENGARUH PENGADAAN SARANA AIR MINUM, PENYEDIAAN AKSES KREDIT,
DAN PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH TERHADAP TINGKAT
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT RENTAN PESISIR**

Hamdan

FE Universitas Serang Raya

Alamat: Jl. Raya Serang Cilegon Serang Banten

Email: hamdan.dr.@gmail.com Hp 08111205555

Abstract

This study aims to predict the impact of fresh water storage, credit access facility to catch fish, and restoration of slum housing toward low income community welfare in the coastal areas. This study used verificative-qualitative approach. This study took place in Tengkurak Village, Pontang District, Serang Regency, Banten. Sample of this study was 33 people and data were collected using questionnaire. The data were analyzed using regression analysis of single and triple predictors. The study revealed that there are significant effect of fresh water storage, credit access facility, and restoration of slum housing toward low income society welfare in the coastal areas in a single effect or altogether that contributes up to 68.3%.

Keywords: fresh water, credit access, housing, welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh pengadaan air minum, penyediaan akses kredit sarana penangkapan ikan, dan penataan permukiman kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat rentan pesisir baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode verifikatif-kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Tengkurak, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jumlah sampel sebanyak 33 orang. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi satu dan tiga prediktor. Hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh antara pengadaan air minum, penyediaan akses kredit sarana penangkapan ikan, dan penataan permukiman kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat rentan pesisir baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sumbangan ketiga variabel sebesar 68,3%.

Kata Kunci: air minum, akses kredit, permukiman, kesejahteraan.

Sulit air bersih, suasana kampung pesisir yang kumuh, ketiadaan sarana mencari ikan, dan kemiskinan yang akut, itulah gambaran riil masyarakat nelayan pesisir utara Kab Serang. Setiap hari masyarakat harus membeli air bersih Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00. Satu keluarga dalam satu bulannya harus membeli air bersih Rp 300.000,00 hingga Rp 450.000,00. Bagaimana kalau setahun, dua tahun, tiga tahun, dan seumur hidup. Air tanah yang ada payau, sehingga tidak bisa digunakan untuk minum dan masak. Masyarakat nelayan pesisir utara Kab Serang mayoritas miskin. Kemiskinannya seumur hidup, bahkan bisa jadi kemiskinannya dibawa hingga mati. Mereka setiap hari bergantung dan hutang pada juragan, yang menyiapkan beras, lauk pauk, sayuran, supermi, teh, gula kopi, alat transportasi laut/kapal, bahan bakar solar, dan seluruh kebutuhan melaut untuk rombongan nelayan.

Sementara itu, keluarga mereka sambil menunggu suaminya melaut juga harus berhutang kepada Bos atau juragan, yang menjual seluruh kebutuhan hidupnya, mulai makan, minum, kesehatan, hingga kebutuhan pendidikan anak. Begitu suaminya pulang melaut, hasil tangkapannya selain hanya sedikit, juga dibeli oleh juragan dengan harga yang murah.

Berhubung seluruh ikan sudah dibeli juragan, maka tempat pelelangan ikan menjadi tidak berpenghuni, karena seluruh ikan dijual kepada majikan, dan oleh majikan ikan tersebut seluruhnya langsung dijual ke kota.

Akibat yang menimpa nelayan, kebutuhan sandang dan papan tidak dapat dipenuhi, karena harga ikan yang dibeli juragan sangat murah, dan seluruh hasil penjualan untuk menutup kebutuhan saat hendak pergi melaut dan menutup seluruh kebutuhan keluarga saat ditinggalkan melaut. Akibatnya, hasil tangkapan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga nelayan. Hal inilah yang menyebabkan mereka sangat miskin dengan kondisi rumah mereka yang sangat kumuh. Dengan kata lain, permasalahan kedua yang membelit-belit masyarakat nelayan pesisir utara Kab Serang yaitu mayoritas miskin. Kemiskinan yang terjadi meliputi kemiskinan sosial, struktural, dan kultural.

Permasalahan selanjutnya yang juga sudah menjadi pemandangan umum adalah, setiap nelayan tidak mempunyai alat tangkap baik jala, perahu kecil/besar, maupun peralatan canggih lainnya. Akibatnya mereka selalu bergantung pada juragan.

Mahi (1999:1) menjelaskan bahwa wilayah pesisir (*coastal zone*) sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Kawasan ini berhadapan langsung dengan laut. Kehidupan masyarakatnya sangat terkait dengan laut atau lingkungan sekitar laut, baik pola kehidupan, mata pencaharian, maupun cara pandangnya. Secara sosiologis, perilaku sosiobudaya masyarakat pesisir tidak dapat sedikitpun dipisahkan dari lingkungan pesisir dan laut, karena secara historis pertumbuhan masyarakat pantai dimulai dari komunitas masyarakat pantai yang sederhana berkembang secara evolutif menyebar sesuai lapangan usaha dan kegiatan yang terus menerus mengalami diversifikasi dan pola pencaharian nafkah yang bertambah variatif

Fenomena kemiskinan yang paradok dengan sumberdaya yang ada dan posisi geografis yang strategis tersebut, hanya dapat diatasi dengan cara menyiapkan sumberdaya berteknologi tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Di antara peneliti yang melihat kemiskinan adalah Soenyono (2013) sebagai misal menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang merupakan fenomena pedesaan baik di pedalaman maupun pesisir. Ia mencirikan penduduk miskin, bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan dan memiliki kegiatan utama di bidang pertanian, dan penduduk pesisir yang bermata pencaharian nelayan. Dari hasil penelitiannya, Soenyono (2013) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin terdapat di pedesaan dan pekerjaan utama kepala rumah tangga di sektor pertanian atau pekerja sendiri, dan sebagian besar lainnya di pesisir dengan sektor perikanan tangkap. Quibria memberikan beberapa ciri-ciri kemiskinan antara lain: (1) banyak ditemui di pedesaan daripada di perkotaan, (2) kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga, (3) kemiskinan ditandai dengan pemilikan aset keluarga, (4) pertanian sebagai sumber penghasilan utama, dan (5) bertalian dengan masalah sosial budaya (Roesminingsih, 1999).

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa kemiskinan banyak terdapat di pedesaan, sehingga dapat diasumsikan bahwa masyarakat pesisir merupakan bagian dari masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga berbicara masyarakat pesisir identik berbicara tentang kemiskinan, walaupun hal itu tidak seluruhnya benar.

Ada beberapa pandangan tentang kemiskinan di antaranya: (1) melihat kemiskinan dikaitkan dengan rendahnya etos kerja, kemiskinan dalam hal ini disebabkan karena malas dan hidup sangat konsumtif, (2) kemiskinan muncul karena ketidakadilan dalam faktor produksi masyarakat; (3) kemiskinan dikaitkan dengan model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan bukan pemerataan.

Menurut Rogers dan Shoemaker, pembangunan merupakan konsep yang memuat multi makna dan berdimensi kompleks dalam mengatasi kemiskinan. Pembangunan memuat dimensi moral dan ada transformasi nilai (materiil dan immateriil) di dalam masyarakat menuju bentuk yang lebih baik. Pembangunan juga terlihat adanya perubahan sosial yang terefleksikan dalam proses transformasi atau perubahan struktur sosial yang meliputi institusi termasuk hubungan di antara institusi tersebut. Selain ini, perubahan juga memuat proses pergeseran orientasi nilai yakni suatu sistem sosial dengan norma modern yang cenderung lebih mudah berubah, mengembangkan teknologi, rasional dan ilmiah, kosmopolit, dan empatik (Usop, 1998)

Konsep pembangunan merupakan suatu dinamika yang berproses dan bukan merupakan suatu kondisi yang statis. Pemahaman ini menggiring pada pengertian adanya gerak dinamik yang mencakup perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga nasional, serta akselerasi pertumbuhan ekonomi,

pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan.

Selama ini kelompok masyarakat termiskin dalam masyarakat kita adalah masyarakat pantai di sekitar pesisir (Bunu, 2014). Melihat kondisi seperti itu perlu pembangunan masyarakat pesisir--sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional--yang berperan menyediakan kesempatan kerja bagi sebagian besar penduduk dan menyediakan bahan baku untuk sektor industri. Pembangunan masyarakat pesisir kembali mendapat perhatian yang serius pada era reformasi, dan diharapkan akan meningkatkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan kelautan.

Haris (1982) memberikan arti transformasi struktur sebagai suatu proses perubahan susunan hubungan sosial ekonomi; berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat yang di dalamnya sistem produksi pertanian terintegrasi ke dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih produktif dan tingkat kehidupannya menjadi lebih baik. Buchori (1994:146) mengartikan transformasi tidak hanya terjadi pada bentuk luaran saja tetapi bersifat menyeluruh. Masalah transformasi merupakan masalah perubahan bentuk dan isi. Pada transformasi sangat dibutuhkan pengetahuan baru, pandangan baru, sikap baru, dan nilai-nilai baru. Berbeda dengan ketiga ahli tersebut, Fakhri (1996) berpendapat bahwa transformasi merupakan proses penciptaan hubungan yang secara fundamental baru dan menjadi lebih baik.

Ada tiga persepsi berkaitan dengan transformasi ini yaitu (1) berkaitan dengan pengertian yang menyangkut perubahan mendasar berskala besar dalam masyarakat dunia, yang beralih dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, (2) transformasi adalah terjadinya perubahan dari sistem kapitalis ke sistem sosialis, sedangkan perubahan pada revolusi industri hanya salah satu wajah transformasi dari sistem feodal ke kapitalis, dan (3) transformasi merupakan konsep alternatif terhadap aliran developmental. Pembangunan yang dilakukan dengan akumulasi modal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga melahirkan kesenjangan ekonomi, kerusakan sumber daya alam, dan lain-lain. Aliran ini merevisi dengan desentralisasi, otonomi, dan partisipasi, dengan kata lain manajemen ekonomi yang berpusat dan bersumber pada rakyat (Rahardjo, 1993).

Teknologi dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas sekaligus untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian antara lain sebagai berikut. *Pertama*, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan alat penyaringan air payau menjadi air bersih; teknologi yang digunakan adalah teknologi tepat guna penyaringan air, yang menggunakan berbagai jenis batuan dan serabut, dengan alasan: a) murah/ biaya terjangkau, b) mudah membuatnya, c) tidak membutuhkan energi listrik, d) seluruh alat dan bahan tersedia di pasaran, e) dapat menghilangkan rasa payau, f) higienes dan g) tahan lama.

Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengajuan kredit perbangkan dalam rangka membeli kapal dan jala, dengan alasan: a) agar masyarakat tidak terbelit hutang secara terus menerus, b) masyarakat terbebas dari lintah darat, c) bunga ringan, d) tanpa agunan, e) besar cicilan rendah, f) berjangka waktu lama, g) keselamatan nelayan secara otomatis ter-cover asuransi.

Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan dalam bentuk: a) bedah rumah, khususnya rumah yang sudah tidak layak huni menjadi rumah sehat, layak huni, dan nyaman untuk ditempati; teknologi yang digunakan yaitu teknologi konstruksi bangunan semi permanen. Teknologi ini dipilih, karena: a) lantai rumah harus bersih dari keramik, b) bangunan bawah rumah harus dari batubata sehingga tidak mudah rusak akibat air laut, dan c) bangunan bagian atas dari triplek/seng/kayu karena memanfaatkan bahan yang sudah ada, sehingga tidak mubazir (sia-sia).

Penataan kebersihan lingkungan dan penghijauan gang-gang yang ada di kampung kumuh nelayan yaitu dengan merapikan gang-gang dengan tambahan paving agar: a) air hujan tetap bisa meresap ke dalam tanah, b) kuat, c) mudah diganti untuk bagian tertentu yang rusak/pecah, d) murah, dan e) dapat dibuat dan dipasang oleh masyarakat. Teknologi penghijauan yang dipilih yaitu penanaman pohon buah-buahan, dengan alasan: a) dapat menghijaukan lingkungan, b) menambah gizi masyarakat, c) bisa dijual hasilnya, d) daun bisa digunakan sebagai kompos, e) perawatan mudah, f) bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan g) semua masyarakat bisa terlibat aktif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian di laksanakan di desa tengkurak, Kecamatan Pontang, Serang, Banten. Populasi nelayan miskin yang ada di lokasi penelitian berjumlah 256 orang dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang. Data diambil dengan menggunakan kuesioner terhadap 33 orang sampel. Sebelum data dianalisis, dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Seluruh hasil uji persaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari lapangan memenuhi seluruh asumsi yang dipersyaratkan dalam analisis statistik inferensial. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi satu dan tiga prediktor dengan bantuan software SPSS versi 19.00.

HASIL

Wilayah Serang secara geografis berada pada koordinat $5^{\circ} 5' - 6^{\circ} 21'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 0' - 106^{\circ} 22'$ Bujur Timur. Luas wilayah 1.467,35 km² dengan jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara-selatan sepanjang 60 km dan jarak terpanjang dari barat--timur sepanjang 90 km, dengan perbatasan sebelah utara dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Tangerang, sebelah barat dengan Kota Cilegon, sebelah barat daya dengan Selat Sunda, sebelah selatan dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Secara administratif, Kabupaten Serang terdiri atas 308 Desa yang berada di 28 Kecamatan. Adapun 5 kecamatan yang ada di pesisir utara meliputi:

Tabel 1. Kecamatan yang ada di Pesisir Utara Kab Serang

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa
1	Carenang	Panenjoan	36,40	10
2	Ciruas	Citerep	40,61	16
3	Pontang	Pontang	64,85	15
4	Tanara	Cerucuk	49,30	9
5	Tirtayasa	Tirtayasa	64,46	14

Sumber: BPS Kab Serang, Banten 2015

Tabel di atas menjelaskan bahwa Serang Utara meliputi Kecamatan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Ciruas dan Carenang. Pusat Pengembangan adalah Kecamatan Tirtayasa. Arah pengembangan di lima kecamatan tersebut meliputi: Pengembangan Pariwisata, Pengembangan Pelabuhan, Pengembangan Pusdiklat, Pengembangan Pertanian Lahan Basah, Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Pantai, Pengembangan Perikanan dan Ternak Unggas, dan Pengembangan Agro-Industri

Jumlah penduduk yang pegawai negeri, pegawai swasta, berwiraswasta, dan pejabat politik hanya 46.650 orang (3,49%), namun masih terdapat 1.289.955 penduduk yang berpotensi mudah menjadi miskin (rentan kemiskinan), seperti menganggur sebanyak 217.086 orang (16,24%), ibu rumah tangga 362.392 orang (27,11%), pedagang kecil-kecilan sebanyak 174.384 orang (13,05%), buruh harian lepas 100.056 orang (7,49%), pekerjaan lain tidak menentu 436,037 orang (32,62%) (BPS Kab. Serang, 2015).

1. Pengujian Hipotesis Pertama (X_1 terhadap Y)

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

H_1 = Ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

Berdasarkan perhitungan analisis data SPSS, Analisis regresi linier dengan *dependent variable* tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan *independent variable* pengadaan sarana air minum diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis pertama

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sign
	B	Std. error	Beta		
1 (Constant)	49.783	17.662		2.819	.008
Pengadaan sarana air minum	.512	.141	.539	3.619	.001

a. Dependent variable: Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir
Sumber: hasil pengolahan data tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa koefisien beta antara ketersediaan sarana air minum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir sebesar 0,539 dengan **t hitung** sebesar 3.619 dengan signifikansi (alfa) sebesar 0.001. Signifikansi $0.001 < 0.005$, dengan demikian berarti, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara ketersediaan sarana air minum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap ketersediaan sarana air minum akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan sebaliknya. Semakin tidak ada ketersediaan sarana air minum akan semakin rendah pula tingkat kesejahterannya. Hal ini terjadi karena apabila di dalam keluarga tidak ada sarana air minum maka dalam setiap harinya, setiap keluarga harus mengeluarkan biaya untuk membeli air minum antara Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00. Dengan kata lain, setiap keluarga dalam satu bulannya harus membeli air bersih antara Rp 300.000,00 hingga Rp 450.000,00. Apabila di dalam keluarga ada sarana pengadaan air minum maka dana tersebut bisa digunakan untuk pendidikan anak, kesehatan, atau menabung. Dalam satu tahunnya bisa menghemat antara Rp3.600.000,00 s.d. Rp 5.400.000,00.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (X_2 terhadap Y)

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

H_1 = Ada pengaruh yang signifikan antara penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

Berdasarkan perhitungan analisis data SPSS, analisis regresi linier dengan *dependent variable* tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan *independent variable* penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sign
	B	Std. error	Beta		
1 (Constant)	52.782	16.653		3.169	0.007
penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan	0.621	0.153	0.564	4.058	0.001

- a. Dependent variable: Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir
 Sumber: hasil pengolahan data tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa koefisien beta antara penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir sebesar 0,5640 dengan dengan **t hitung** sebesar 4.058 dengan signifikansi (alfa) sebesar 0.001. Signifikansi $0.001 < 0.005$, dengan demikian berarti, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara penyediaan akses kredit untuk pengadaan alat penangkapan ikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lengkap sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan sebaliknya. Semakin tidak ada sarana penangkapan ikan yang dimiliki nelayan akan semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini terjadi karena apabila nelayan tidak mempunyai alat tangkap seperti perahu, jaring ikan, maka nelayan itu akan sangat tergantung pada pemilik modal (Boss) yang akan memberi pinjaman kepada nelayan saat hendak berangkat ke laut mulai dari kapal dan seluruh perlengkapannya, bahan bakar, bahan makanan selama di laut, rokok, air minum, dan seluruh kebutuhan melaut lainnya. Sehingga para nelayan akan sangat tergantung pada Boss dan seluruh ikan hasil tangkapannya akan dibeli oleh Boss dengan harga yang sangat rendah.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga (X_3 terhadap Y)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

H_1 = Ada pengaruh yang signifikan antara penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

Berdasarkan perhitungan analisis data SPSS, analisis regresi linier dengan *dependent variable* tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan *independent variable* penataan lingkungan kumuh diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	T	Sign
	B	Std. error	Beta		
1 (Constant)	50.733	13.325		3.807	0.006
Penataan lingkungan	0.532	0.131	0.537	4.061	0.001

a. Dependent variable: Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir
Sumber: hasil pengolahan data tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa koefisien beta antara penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir sebesar 0,537 dengan dengan **t hitung** sebesar 4.061 dengan signifikansi (alfa) sebesar 0.001. Signifikansi $0.001 < 0.005$, dengan demikian berarti, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa baik penataan lingkungan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terhadap kampung nelayan akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan sebaliknya. Semakin tidak penataan lingkungan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Hal ini terjadi karena apabila lingkungan nelayan kumuh, akan menjadi sarang nyamuk, sarang penyakit, atau sarang bakteri sehingga akan memicu terjadinya penyakit yang akan menyerang masyarakat. Ketika salah satu anggota keluarga nelayan sakit tentu akan memerlukan biaya kesehatan yang sangat besar, kepala keluarga tidak bisa melaut, sekolah anak-anak menjadi terhambat, biaya kehidupan sehari-hari selalu tergantung pada pemilik modal.

4. Pengujian Hipotesis Keempat (X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

H_1 = Ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

Berdasarkan perhitungan analisis data SPSS, analisis regresi linier ganda dengan *dependent variable* tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan tiga *independent variable* yaitu pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh diperoleh hasil analisis regresi ganda sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Keempat

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sign
Regression	1162.212	3	367.303	11.597	0.000
Residual	1002.170	30	33.406		
Total	2164.382	33			

- a. Predictors (constant): pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh
- b. *Dependent Variable*: Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir

Sumber: hasil pengolahan data tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa koefisien F antara pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir sebesar 11.597 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa baik pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir dan sebaliknya. Semakin tidak ada sarana air minum, tidak ada penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan tidak ada penataan lingkungan kumuh yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat akan semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya.

Adapun sumbangan (R) ketiga variabel tersebut sebesar 0.683 atau dengan kata lain, pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh memberikan sumbangan secara bersama sama sebesar 68,3%. Sisanya sebesar 31.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui penelitian ini.

BAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pada dasarnya hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firth (1966) yang menyimpulkan bahwa sistem ekonomi perikanan pada masyarakat nelayan secara struktural antara lain bercirikan: berskala kecil, peralatan dan organisasi mata pencaharian yang

sederhana, eksploitasi merupakan masalah yang membelenggu berbagai corak perilaku ekonomi. Firth berhasil mengungkapkan secara terperinci tentang masyarakat nelayan Melayu khususnya nelayan di daerah Kelantan dan Trengganu dengan tekanan khusus pada modal usaha, kredit, penangkapan dan pemasaran ikan, dan akumulasi pendapatan. Investasi untuk pengadaan sarana produksi berasal terutama dari nelayan sendiri apakah itu nelayan Cina atau pun nelayan setempat. Investasi ini dilakukan dengan modal yang diperoleh dari hasil usaha penangkapan ikan yang mereka lakukan maupun dari hasil menggandaikan tanah di daratan yang ia miliki ataupun tanah yang digunakan untuk mendirikan rumah mereka. Persamaannya, yaitu sama sama berkaitan dengan modal usaha, kredit nelayan dengan pemilik modal, investasi sarana menangkap ikan, dan pemasaran ikan yang sangat terikat pada pemilik modal yang membiayai nelayan saat hendak melaut dan membiayai kehidupan keluarga nelayan saat ditinggalkan melaut. Perbedaannya, pada hasil penelitian ini, mayoritas nelayan tidak menggadaikan tanah tempat tinggal mereka, tetapi mereka sangat terlilit hutang dengan pemilik modal yang jumlahnya setiap hari semakin besar, karena hasil tangkapan ikan tidak sesuai dengan pengeluaran.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan temua hasil studi yang telah dilakukan oleh Emmerson (1976) tentang nelayan Muncar, Banyuwangi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa benturan antara kedua kelompok nelayan dengan tingkat kemampuan yang berbeda menunjukkan adanya garis pemisah yang tajam antara keduanya. Nelayan pemilik modal selalu bertambah kaya, sementara itu nelayan yang tidak mempunyai modal akan selalu kalah dan selalu tergantung pada pemilik modal. Dengan demikian, persamaan penelitian ini dengan penelitian Emmerson yaitu sama-sama adanya hubungan patron-klient antara nelayan kaya yang mempunyai modal prasarana melaut dan nelayan buruh yang sangat tergantung kehidupannya pada nelayan kaya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alexander (1982) di Sri langka yang menyimpulkan bahwa (1) kedudukan laut dalam perekonomian nelayan laksana kedudukan tanah bagi petani, (2) terjadi perkembangan yang bertahap pada usaha penangkapan ikan, dari tahap ekonomi subsisten, ke semi subsisten, dan selanjutnya ke tahap ekonomi komersial. Perbedaan penelitian Alexander dengan penelitian ini yaitu pada adanya perkembangan tingkat perekonomian nelayan. Pada penelitian ini sama sekali tidak ada perkembangan ekonomi nelayan, manakala tidak ada variabel pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh. Ketika ketiga variabel tersebut bekerja, maka tingkat kesejahteraan nelayan miskin di pesisir Banten akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Studi yang dilakukan Mumbyarto (1984) yang meneliti kemiskinan masyarakat nelayan di Jepara tentang nelayan tradisional di pantai utara Jawa. Penelitian itu melukiskan adanya jarak antara kedua kelompok nelayan di atas. Adanya garis pemisah antara kedua kelompok nelayan tersebut, yakni ada perbedaan yang mencolok antara nelayan yang berteknologi

maju, berkemampuan eksploitasi tinggi, dan bermodal besar, dengan nelayan ikan yang mempunyai teknologi rendah, kemampuan eksploitasi rendah, dan modal terbatas. Nelayan dengan modal besar dapat membeli peralatan tangkap dengan teknologi tinggi, dan daya tangkap yang maksimal. Sebaliknya, nelayan miskin hanya mampu membeli peralatan tangkap dengan teknologi rendah, sehingga mempunyai daya tangkap yang rendah baik kuantitas maupun kualitas ikan tangkapannya, kemudian mereka frustrasi dan memilih menjadi buruh nelayan kaya. Akibat lebih jauh, nelayan tidak bermodal menjadi semakin miskin dan semakin tergantung pada nelayan kaya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka harus dicarikan jalan keluar dengan memberikan akses pada lembaga pemberi kredit yang bisa memberikan modal kepada nelayan miskin untuk membeli perahu berteknologi tinggi dan alat tangkap berteknologi tinggi. Dengan langkah itu, mereka sedikit demi sedikit akan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan yang menjerat mereka. Garis pemisah antara industri penangkapan ikan yang maju dengan kemampuan eksploitasi yang tinggi dan usaha penangkapan ikan rakyat dengan kemampuan eksploitasi yang rendah menjadikan jurang pemisah nelayan pada satu tempat menjadi semakin menganga yang akan menyebabkan kecemburuan sosial.

Hasil penelitian ini juga sangat sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Jonge (1989). Studi tersebut dilakukan terhadap nelayan di Madura. De Jonge memfokuskan perhatian pada masalah pengadaan modal usaha dan konsekwensi yang ditimbulkannya. Hasil studi tersebut menemukan bahwa usaha penangkapan ikan adalah usaha ekonomi yang padat modal dan dalam melakukan usahanya, para nelayan pada umumnya bermodal pinjaman dan karenanya mereka kebanyakan bergantung pada pedagang atau pemberi modal. Ketergantungan ini menyebabkan terjadinya monopoli pembelian hasil tangkapan dan akibat lebih lanjut adalah penumpukan modal, apabila terjadi surplus pendapatan tidak terjadi pada nelayan akan tetapi pada pemilik modal. Hasil penelitian tersebut sama persis dengan realitas yang terjadi pada masyarakat pesisir utara Banten yang menjadi lokasi penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Martosubroto (1987) yang melakukan studi mikro dan lebih menekankan pada aspek ekonomi yang melihat usaha perikanan sebagai suatu unit usaha ekonomi. Martosubroto menerapkan analisis ekonomi terhadap trawl di Indonesia dan melihatnya sebagai suatu unit usaha dan pengaruhnya pada masyarakat nelayan.

Hasil penelitian ini juga menguatkan hasil penelitian Masyhuri (1995) mengenai pasang surut usaha perikanan laut, yang dilakukan di Jawa dan Madura dengan menggunakan tinjauan sosial ekonomi, menyimpulkan bahwa masalah modal dan pemasaran produksi ikan merupakan faktor kunci dalam sektor usaha penangkapan ikan rakyat. Pada saat modal usaha tersedia, pemasaran ikan lancar, nelayan terlibat langsung ke dalam aktivitas pasar, maka usaha penangkapan ikan akan mengalami pertumbuhan yang pesat, dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Konsultan Keluarga Nelayan Indah (KNI) LPPM USU Medan (1997) yang telah melakukan penelitian dengan pendekatan ekonomi. Penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup nelayan menuju ketangguhan, ketahanan dan kemandirian meliputi: (1) melakukan modernisasi alat/sarana penangkapan ikan, (2) adanya industri pascapanen yang menunjang proyek perikanan dalam aspek pemasaran, (3) peningkatan usaha eceran (4) peningkatan bank desa dan sebagainya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.
2. Ada pengaruh yang signifikan antara penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.
3. Ada pengaruh yang signifikan antara penataan lingkungan kumuh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara pengadaan sarana air minum, penyediaan akses kredit untuk pengadaan sarana penangkapan ikan, dan penataan lingkungan kumuh secara bersama-sama terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, P. 1977. *Sri Lanka Fishermen: Rural Capitalism and Peasant Society*. Canberra: Australian National University.
- BPS. 2015. Banten dalam Angka 2015. Serang: BPS Provinsi Lampung
- Buchori, M.1994. *Transformasi, Sukses Demokrasi*. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta.
- Bunu, Helmuth Y. 2014. *Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Surabaya: Jengjala Pustaka Utama
- Emmerson, DK. 1976. Biting the Helping Hand: Modernization and violencein an Indonesian Fishing Community. *Land Tenure Center Newsletter* No, 51, January-March 1976.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pengelolaan Idiologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firth, R. 1966. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. Landon: Routledge & Kegal Paul.
- Haris. J. 1982. *Rural Development Theories of Peasant Economy and Agrarian Change*. London, Melbourne, Sydney: Huntchinson University Library.
- Jonge. H. De. 1989. *Madura Dalam Empat Jaman*. Jakarta: Gramedia
- Kabupaten Serang, 2013, *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Sosbudpem Kabupaten Serang Tahun 2014*. Serang: Kab. Serang
- Mahi, 1999, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Secara Terpadu, Dies Natalis UNILA*, (Bandar Lampung: Unila

210 Hamdan. 2016. Pengaruh Pengadaan Sarana Air Minum, Penyediaan Akses Kredit, dan Penataan Permukiman Kumuh terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Rentan Pesisir. *Konstruktivisme*. 8(2): 197-210.

- Martosubroto, Purwito. 1987. An Economic Analisis of the 1980 Indonesian Trawl Ban. *Indonesian Agricultural Research and Development Journal* No 1-2.
- Masyhuri.1995. *Pasang Surut Usaha Perikanan Laut: Tinjauan Sosial Ekonomi Kenelayanan di Jawa dan Madura 1850-1940*. Amsterdam. Vrije Universiteit.
- Mumbiyarto. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan: Sudi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, MD. 1993. *Intelektual Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa. Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan
- Roeminingsih. 1999. Evaluasi Program IDT di Jawa Timur. *Desertasi* Tidak diterbitkan. Surabaya: PPs Universitas Airlangga.
- Serangkab.go.id *website resmi pemerintahan kabupaten serang*, 2015.
- Soenyono. 2014. *Teori Kemiskinan Kontemporer*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama
- Tim Konsultasi KNI LPPM USU Medan. 1997. *Strategi Pembangunan Nelayan Indah (KNI) Kec. Medan Labuhan Kodya Medan*. Medan. USU Press
- Usop, Sidik Rahman. 1998. Pembangunan yang Bertumpu pada Masyarakat. *Makalah*. Palangkaraya. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Universitas Palangkaraya.